

HUMANISME PENDIDIKAN PAULO FREIRE DALAM IMPLEMENTASI SEKOLAH INKLUSI BAGI SISWA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Fitri Amalia Majid¹, Azima Wahidatu Wildana², Yuliana Nurul Islami³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Kediri, Indonesia

Email : famali:majid@gmail.com¹, azimawahidatu.wildana@gmail.com²,

yuliananurulisлами@gmail.com³

Received: June 2026

Accepted: June 2026

Published: July 2026

Abstract :

Inclusive education is an effort to realise educational justice for all learners, including children with special needs. However, the practice of inclusive education continues to face various challenges, including stigma, discrimination, and the limited participation of students with special needs in the learning process. This study aims to analyse the relevance of Paulo Freire's educational humanism to the implementation of inclusive schools, examine the manifestation of the values of dialogue, humanisation, critical consciousness, and liberation, identify the supporting and inhibiting factors in its application, and analyse its contribution to the participation, empowerment, and development of the potential of students with special needs. This study employs a qualitative approach using library research. Data were obtained from Paulo Freire's works, scholarly articles, academic books, and relevant previous studies, and were then analysed using content analysis techniques. The findings indicate that Paulo Freire's educational humanism has strong relevance to inclusive education, as both emphasise respect for human dignity, equality, and participation. The values of dialogue, humanisation, critical consciousness, and liberation play an important role in creating an inclusive learning environment and supporting the empowerment of students with special needs. The successful implementation of these values is influenced by teacher competence, school culture, and policy support, while social stigma and traditional learning paradigms remain the main obstacles. Therefore, Paulo Freire's educational humanism can serve as a philosophical foundation for developing inclusive schools that are more humane, democratic, and socially just.

Keywords : Educational Humanism; Paulo Freire; Inclusive Schools; Children with Special Needs; Inclusive Education.

Abstrak :

Pendidikan inklusi merupakan upaya mewujudkan keadilan pendidikan bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, praktik pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai hambatan berupa stigma, diskriminasi, dan rendahnya partisipasi siswa ABK dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi humanisme pendidikan Paulo Freire dalam implementasi sekolah inklusi, mengkaji perwujudan nilai-nilai dialog, humanisasi, kesadaran kritis, dan pembebasan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya, serta menganalisis kontribusinya terhadap partisipasi, pemberdayaan, dan pengembangan potensi siswa ABK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari karya-karya Paulo Freire, artikel ilmiah, buku akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humanisme pendidikan Paulo Freire memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan inklusif karena sama-sama menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan partisipasi. Nilai-nilai dialog, humanisasi, kesadaran kritis, dan pembebasan berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung

pemberdayaan siswa ABK. Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kompetensi guru, budaya sekolah, dan dukungan kebijakan, sedangkan stigma sosial dan paradigma pembelajaran tradisional menjadi hambatan utama. Dengan demikian, humanisme pendidikan Paulo Freire dapat menjadi landasan filosofis bagi pengembangan sekolah inklusi yang lebih humanis, demokratis, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Humanisme Pendidikan; Paulo Freire; Sekolah Inklusi; Anak Berkebutuhan Khusus; Pendidikan Inklusif.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi merupakan manifestasi konkret dari prinsip keadilan sosial yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Secara normatif, paradigma pendidikan inklusif berakar pada prinsip humanisasi yang memandang setiap peserta didik sebagai subjek yang memiliki martabat, potensi, dan hak yang setara dalam proses pendidikan. Pemikiran Paulo Freire menjadi salah satu landasan filosofis yang relevan karena menempatkan pendidikan sebagai praksis pembebasan yang bertujuan membangun kesadaran kritis, dialog, dan transformasi sosial melalui penghargaan terhadap kemanusiaan peserta didik. Freire menolak model pendidikan “gaya bank” (banking education) yang memosisikan peserta didik sebagai objek pasif, serta menegaskan pentingnya relasi dialogis antara guru dan peserta didik dalam membangun pengetahuan secara kolektif. Namun demikian, realitas penyelenggaraan sekolah inklusi masih menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas humanisme pendidikan dan praktik di lapangan. Berbagai bentuk eksklusi simbolik, stigmatisasi, serta rendahnya partisipasi siswa ABK dalam proses pembelajaran masih ditemukan dalam berbagai konteks pendidikan inklusif. Bahkan, anak-anak penyandang disabilitas sering kali menghadapi stereotip sosial yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang “kurang mampu”, sehingga menghambat aktualisasi potensi mereka secara optimal. Freire menjelaskan bahwa kelompok yang mengalami opresi cenderung menginternalisasi pandangan negatif yang dilekatkan masyarakat kepada dirinya, sehingga melahirkan perasaan rendah diri dan ketidakberdayaan dalam kehidupan sosial maupun pendidikan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara teori humanisme pendidikan Paulo Freire yang menekankan pembebasan dan penghormatan terhadap martabat manusia dengan fakta sosial implementasi sekolah inklusi yang masih diwarnai berbagai bentuk marginalisasi terhadap siswa ABK.

Kajian mengenai humanisme Paulo Freire dan pendidikan inklusi telah

berkembang secara luas dalam literatur pendidikan kontemporer. Penelitian Santos et al., (2021) menunjukkan bahwa konsep pendidikan pembebasan Paulo Freire memiliki kontribusi penting bagi pendidikan khusus melalui pengembangan hubungan yang lebih horizontal antara guru dan peserta didik serta penekanan pada penguatan potensi individu dibandingkan keterbatasannya. Sementara itu, Sgambelluri & De Domenico (2023) menegaskan bahwa pendidikan inklusif yang berlandaskan pemikiran Freire harus dibangun melalui dialog, kesadaran kritis, dan pemberdayaan peserta didik sehingga pendidikan menjadi praktik kebebasan yang menghargai keberagaman manusia. Penelitian Kocha & Senapathy (2022) menemukan bahwa implementasi pendidikan inklusif sering menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman guru, kurangnya fasilitas pendukung, dan lemahnya komitmen kelembagaan dalam mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Di sisi lain, Dube et al., (2021) mengidentifikasi bahwa stigma sosial, diskriminasi, dan stereotip terhadap penyandang disabilitas menjadi faktor utama yang menyebabkan eksklusi pendidikan di berbagai negara berkembang. Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan, sebagian besar masih membahas pendidikan inklusi dari perspektif kebijakan, manajemen sekolah, atau pendidikan khusus secara umum. Kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi sekolah inklusi melalui perspektif humanisme pendidikan Paulo Freire, khususnya dalam konteks pemberdayaan siswa ABK, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil posisi sebagai upaya sintesis antara filsafat pendidikan humanis Freire dan praktik pendidikan inklusif kontemporer.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif humanisme kritis Paulo Freire sebagai kerangka analisis utama dalam memahami implementasi sekolah inklusi bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Sebagian besar penelitian terdahulu memfokuskan perhatian pada aspek teknis pendidikan inklusif seperti ketersediaan sarana prasarana, kompetensi guru, adaptasi kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Padahal, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif dan struktural, melainkan juga oleh paradigma filosofis yang mendasari relasi pendidikan itu sendiri. Dalam konteks ini, penelitian mengembangkan perspektif bahwa sekolah inklusi tidak sekadar menyediakan akses pendidikan bagi siswa ABK, tetapi harus menjadi ruang humanisasi yang memungkinkan

peserta didik memperoleh pengakuan, partisipasi, otonomi, dan pemberdayaan secara setara. Argumen tersebut sejalan dengan gagasan Freire bahwa pendidikan harus menjadi instrumen transformasi sosial yang menolak segala bentuk opresi, diskriminasi, dan ketidakadilan melalui pengembangan kesadaran kritis dan praksis emansipatoris . Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan konsep pedagogi transformatif yang menempatkan keberagaman peserta didik sebagai sumber pembelajaran dan bukan sebagai hambatan pendidikan . Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menghubungkan humanisme Freire dengan praktik pendidikan inklusif sebagai suatu pendekatan filosofis yang berorientasi pada pembebasan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan berbagai persoalan konseptual dan empiris yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep humanisme pendidikan Paulo Freire dalam implementasi sekolah inklusi bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perwujudan nilai-nilai dialog, humanisasi, kesadaran kritis, dan pembebasan dalam praktik pendidikan inklusif yang berlangsung di lingkungan sekolah. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan humanisme pendidikan Paulo Freire dalam penyelenggaraan sekolah inklusi. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendekatan humanistik Paulo Freire mampu mendorong partisipasi, pemberdayaan, serta pengembangan potensi siswa anak berkebutuhan khusus secara optimal. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi paradigma humanisme pendidikan Paulo Freire sebagai fondasi filosofis dalam mewujudkan praktik sekolah inklusi yang lebih adil, demokratis, humanis, dan transformatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berorientasi pada penelaahan, interpretasi, dan sintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema humanisme pendidikan Paulo Freire dan implementasi sekolah inklusi bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi konseptual secara mendalam terhadap gagasan-gagasan filosofis Paulo Freire, sekaligus menghubungkannya dengan perkembangan

wacana pendidikan inklusif dalam konteks kontemporer. Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan primer dan sekunder yang meliputi karya-karya Paulo Freire, seperti *Pedagogy of the Oppressed*, *Pedagogy of Hope*, dan *Pedagogy of Autonomy*, serta artikel ilmiah, jurnal bereputasi, buku akademik, dokumen kebijakan pendidikan inklusif, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pendidikan humanis, pendidikan inklusif, serta pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi berbagai referensi yang memiliki relevansi substantif terhadap fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) yang bertujuan untuk mengungkap makna, gagasan, nilai, serta konstruksi pemikiran yang terkandung dalam berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis diawali dengan reduksi data melalui seleksi sumber yang kredibel dan relevan, dilanjutkan dengan kategorisasi tema-tema utama yang berkaitan dengan konsep humanisasi, dialog, kesadaran kritis (*conscientization*), dan pendidikan pembebasan dalam perspektif Paulo Freire. Selanjutnya, data diinterpretasikan secara hermeneutik-kritis guna menemukan keterkaitan antara prinsip-prinsip humanisme Freire dengan karakteristik pendidikan inklusif bagi siswa anak berkebutuhan khusus. Untuk menjamin validitas kajian, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang memiliki fokus pembahasan serupa sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan konstruksi konseptual yang mendalam mengenai relevansi humanisme pendidikan Paulo Freire sebagai landasan filosofis dalam mewujudkan praktik sekolah inklusi yang humanis, emansipatoris, dan berkeadilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Konsep Humanisme Pendidikan Paulo Freire dalam Implementasi Sekolah Inklusi bagi Siswa Anak Berkebutuhan Khusus

Humanisme pendidikan Paulo Freire memiliki relevansi yang sangat kuat dalam implementasi sekolah inklusi karena keduanya berpijak pada paradigma yang sama, yakni penghormatan terhadap martabat manusia, pengakuan atas keberagaman, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan dehumanisasi. Dalam perspektif Freire, pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan suatu praksis pembebasan yang memungkinkan setiap individu menjadi subjek yang aktif dalam membangun

pengetahuan dan mentransformasikan realitas sosialnya. Pendidikan yang humanis menempatkan manusia sebagai pusat proses pendidikan dengan mengakui potensi, pengalaman, serta identitas yang dimiliki oleh setiap peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun budaya mereka. Pandangan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan filosofi pendidikan inklusif yang menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, berpartisipasi secara penuh dalam pembelajaran, dan memperoleh pengakuan atas keberadaannya sebagai individu yang bermartabat. Oleh karena itu, konsep humanisme Freire dapat dipandang sebagai fondasi filosofis yang memperkuat orientasi pendidikan inklusif dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh peserta didik (Galiza et al., 2022; Santos et al., 2021).

Secara konseptual, relevansi pemikiran Freire terhadap pendidikan inklusif tampak pada kritiknya terhadap praktik pendidikan yang bersifat opresif dan eksklusif. Freire menegaskan bahwa sistem pendidikan yang memperlakukan peserta didik sebagai objek pasif hanya akan mereproduksi relasi ketidakadilan dan mempertahankan struktur dominasi yang menindas kelompok-kelompok marginal. Dalam konteks pendidikan inklusif, siswa anak berkebutuhan khusus sering kali menjadi kelompok yang mengalami marginalisasi akibat stereotip, prasangka sosial, serta rendahnya ekspektasi terhadap kemampuan mereka. Penelitian Santos et al., (2021) menunjukkan bahwa pemikiran Freire memberikan kontribusi penting bagi pendidikan khusus melalui pengembangan pendidikan yang berorientasi pada potensi peserta didik, bukan pada keterbatasannya. Freire memandang bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial apabila memperoleh kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Perspektif ini menggeser paradigma pendidikan khusus dari pendekatan defisit menuju pendekatan pemberdayaan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk membangun dirinya sendiri melalui proses pendidikan yang dialogis dan reflektif.

Lebih lanjut, prinsip dialog sebagai inti humanisme Freire memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam praktik sekolah inklusi. Freire memandang dialog sebagai sarana humanisasi yang memungkinkan terjadinya hubungan yang setara antara guru dan peserta didik. Dialog tidak hanya

dipahami sebagai komunikasi verbal, tetapi juga sebagai proses saling menghargai, mendengarkan, dan mengakui eksistensi pihak lain sebagai subjek yang memiliki suara dan pengalaman hidup yang berharga. Dalam konteks sekolah inklusi, penerapan prinsip dialog menjadi sangat penting karena memungkinkan siswa ABK untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta memperoleh ruang untuk mengekspresikan kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman mereka. Penelitian Sgambelluri & De Domenico (2023) menegaskan bahwa pendidik inklusif harus mengembangkan praksis pendidikan yang berbasis dialog, relasi kemanusiaan, dan penghargaan terhadap keunikan setiap peserta didik. Melalui pendekatan tersebut, proses pendidikan tidak lagi berpusat pada guru sebagai pemegang otoritas tunggal pengetahuan, melainkan menjadi ruang kolaboratif yang memungkinkan semua peserta didik belajar dan berkembang secara bersama-sama tanpa adanya relasi dominasi maupun subordinasi.

Relevansi humanisme Freire terhadap pendidikan inklusif juga terlihat pada konsep *conscientization* atau kesadaran kritis. Freire berpendapat bahwa pendidikan harus membantu peserta didik memahami realitas sosial yang melingkupinya sehingga mampu mengenali berbagai bentuk ketidakadilan dan melakukan tindakan transformasi terhadap kondisi tersebut. Dalam konteks pendidikan inklusif, kesadaran kritis diperlukan untuk membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Corbett & Guilherme (2021) menjelaskan bahwa warisan pedagogi kritis Freire terletak pada kemampuannya mendorong transformasi sosial melalui pendidikan yang mengakui pengalaman hidup peserta didik, menghargai pengetahuan lokal, serta membangun partisipasi yang bermakna dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, implementasi pendidikan inklusif yang berlandaskan humanisme Freire tidak hanya bertujuan memberikan akses pendidikan bagi siswa ABK, tetapi juga membangun kesadaran kolektif seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih demokratis, egaliter, dan berkeadilan sosial.

Selain itu, berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pemikiran Freire tetap relevan dalam menjawab tantangan pendidikan inklusif abad ke-21. Galiza et al., (2022) menyatakan bahwa pendidikan inklusif pada hakikatnya merupakan gerakan sosial yang memperjuangkan pengakuan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi dan

marginalisasi dalam sistem pendidikan. Dalam perspektif tersebut, gagasan Freire mengenai pendidikan yang dialogis, humanis, dan membebaskan menjadi kerangka teoritis yang mampu menjelaskan pentingnya penghormatan terhadap alteritas (otherness) dan keberagaman dalam lingkungan pendidikan. Senada dengan hal tersebut, Esquinsani (2021) menegaskan bahwa sekolah yang inklusif merupakan sekolah yang dibangun atas dasar rasa ingin tahu kritis, penghargaan terhadap perbedaan, serta komitmen untuk menolak segala bentuk eksklusi sosial. Oleh karena itu, konsep humanisme pendidikan Paulo Freire tidak hanya relevan secara filosofis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun budaya sekolah yang menghormati hak, potensi, dan martabat siswa anak berkebutuhan khusus sebagai bagian integral dari komunitas pendidikan.

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian substantif antara prinsip-prinsip humanisme pendidikan Paulo Freire dan nilai-nilai dasar pendidikan inklusif. Humanisasi, dialog, kesadaran kritis, pembebasan, dan penghormatan terhadap keberagaman merupakan elemen-elemen fundamental yang menjadi titik temu antara pedagogi Freire dan implementasi sekolah inklusi. Di tengah masih kuatnya praktik eksklusi, stigma, dan ketimpangan akses pendidikan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus di berbagai negara, sebagaimana diungkapkan oleh Dube et al. (2021) dan Kocha dan Senapathy (2022), pemikiran Freire menawarkan perspektif alternatif yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen emansipasi sosial dan penguatan martabat manusia. Dengan demikian, humanisme pendidikan Paulo Freire memiliki relevansi yang sangat signifikan sebagai landasan filosofis dan pedagogis dalam mewujudkan sekolah inklusi yang tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi siswa ABK, tetapi juga menjamin partisipasi, pemberdayaan, dan pengakuan penuh terhadap kemanusiaan mereka sebagai subjek pendidikan yang setara.

Perwujudan Nilai-Nilai Dialog, Humanisasi, Kesadaran Kritis, dan Pembebasan dalam Praktik Pendidikan Inklusif

Implementasi pendidikan inklusif pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan akses pendidikan bagi siswa anak berkebutuhan khusus (ABK), melainkan juga menyangkut transformasi paradigma pendidikan yang mampu menghargai keberagaman, menjunjung martabat manusia, dan menghapus berbagai bentuk eksklusi yang masih berlangsung di lingkungan sekolah. Dalam konteks tersebut, pemikiran Paulo Freire menawarkan kerangka

filosofis yang relevan melalui nilai-nilai dialog, humanisasi, kesadaran kritis (*conscientização*), dan pembebasan yang menjadi fondasi utama pedagogi kritis. Freire memandang pendidikan sebagai proses humanisasi yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya secara utuh sebagai manusia yang merdeka, bukan sekadar objek penerima pengetahuan. Oleh karena itu, praktik pendidikan inklusif yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak siswa ABK harus dibangun di atas relasi pendidikan yang demokratis, partisipatif, dan dialogis. Santos et al. (2021) menegaskan bahwa kontribusi utama pemikiran Freire terhadap pendidikan khusus terletak pada upaya membangun hubungan yang lebih horizontal antara guru dan peserta didik, sehingga proses pembelajaran tidak lagi berfokus pada keterbatasan individu, tetapi pada pengembangan potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif yang humanis tidak menempatkan siswa ABK sebagai kelompok yang “berbeda” atau “kurang mampu”, melainkan sebagai subjek pendidikan yang memiliki kapasitas untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sekolah.

Salah satu nilai fundamental dalam pedagogi Freire yang menemukan relevansinya dalam praktik pendidikan inklusif adalah dialog. Bagi Freire, dialog bukan sekadar komunikasi verbal, melainkan suatu proses ontologis yang memungkinkan manusia membangun hubungan timbal balik yang dilandasi penghormatan, kepercayaan, dan pengakuan terhadap eksistensi pihak lain. Dalam konteks sekolah inklusi, dialog menjadi sarana penting untuk menciptakan ruang belajar yang menerima keberagaman dan mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik tanpa diskriminasi. Guru tidak lagi berperan sebagai pemegang otoritas tunggal yang mendominasi proses pembelajaran, tetapi sebagai mitra belajar yang bersama-sama dengan peserta didik membangun pengetahuan melalui interaksi yang setara. Sgambelluri & De Domenico (2023) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif yang terinspirasi oleh pemikiran Freire harus berlandaskan pada hubungan dialogis yang mampu membebaskan peserta didik dari ketakutan, ketergantungan, dan berbagai bentuk marginalisasi. Melalui dialog, peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan untuk menyuarakan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasinya sehingga keberadaannya diakui sebagai bagian integral dari komunitas belajar. Dengan demikian, dialog berfungsi sebagai instrumen pedagogis yang memperkuat partisipasi siswa ABK sekaligus membangun

budaya sekolah yang lebih inklusif dan demokratis.

Selain dialog, nilai humanisasi merupakan dimensi sentral yang menentukan keberhasilan pendidikan inklusif. Humanisasi dalam perspektif Freire merujuk pada proses memanusiakan manusia melalui pengakuan terhadap martabat, kebebasan, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Pendidikan yang humanis menolak segala bentuk objektifikasi dan dehumanisasi yang menyebabkan peserta didik diperlakukan sebagai objek kebijakan atau sekadar angka statistik dalam sistem pendidikan. Dalam praktik pendidikan inklusif, humanisasi diwujudkan melalui penghargaan terhadap keragaman karakteristik peserta didik serta penyediaan lingkungan belajar yang memungkinkan seluruh siswa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Galiza et al., (2022) menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan gerakan sosial yang memperjuangkan pengakuan terhadap kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi, sehingga prinsip humanisasi menjadi elemen fundamental dalam penyelenggaraannya. Pendidikan inklusif yang berlandaskan humanisme Freire berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang menghormati alteritas atau keberlainan, sekaligus menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang harus dihargai tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun budaya yang dimilikinya.

Perwujudan nilai humanisasi tersebut juga tampak dalam upaya sekolah untuk menghilangkan berbagai bentuk stigma dan stereotip terhadap siswa berkebutuhan khusus. Dube et al., (2021) menemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusif di berbagai negara berkembang bukan semata-mata keterbatasan fasilitas, melainkan masih kuatnya prasangka sosial, mitos, dan persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan siswa ABK sering kali mengalami eksklusi sosial meskipun secara administratif telah diterima dalam sekolah reguler. Dalam perspektif Freire, situasi demikian merupakan bentuk dehumanisasi yang harus dilawan melalui pendidikan yang membangun kesadaran sosial dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, praktik pendidikan inklusif yang humanis tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan akses fisik semata, tetapi juga melalui transformasi budaya sekolah yang menempatkan keberagaman sebagai kekayaan bersama dan bukan sebagai hambatan dalam proses pendidikan.

Nilai berikutnya yang memiliki relevansi kuat dalam pendidikan inklusif

adalah kesadaran kritis (*critical consciousness*). Freire memandang bahwa pendidikan harus membantu peserta didik memahami realitas sosial yang melingkupinya sehingga mereka mampu mengenali berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan sosial. Kesadaran kritis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen refleksi, tetapi juga sebagai dasar bagi tindakan transformasi sosial. Dalam konteks pendidikan inklusif, kesadaran kritis diperlukan untuk membangun pemahaman bahwa diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat diubah melalui pendidikan. Corbett & Guilherme (2021) menjelaskan bahwa warisan pedagogi kritis Freire terletak pada kemampuannya menghubungkan refleksi dan tindakan dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang lebih adil. Pendidikan yang berorientasi pada kesadaran kritis mendorong guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah untuk merefleksikan praktik-praktik eksklusif yang masih berlangsung serta mengembangkan komitmen kolektif dalam membangun lingkungan pendidikan yang menghargai kesetaraan dan keadilan sosial.

Kesadaran kritis dalam pendidikan inklusif juga berkaitan erat dengan kemampuan sekolah untuk melihat keberagaman sebagai sumber pembelajaran yang berharga. Gandolfi (2023) menegaskan bahwa pemikiran Freire tentang komunikasi dialogis, praksis, dan transformasi sosial memberikan landasan penting bagi pengembangan pendidikan yang mampu melawan marginalisasi dan dehumanisasi. Dalam praktiknya, sekolah inklusi yang berlandaskan kesadaran kritis tidak hanya berupaya mengakomodasi siswa ABK secara administratif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya solidaritas, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjadi ruang sosial yang memungkinkan peserta didik belajar memahami realitas keberagaman secara lebih mendalam serta mengembangkan sikap kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Pada akhirnya, seluruh nilai tersebut bermuara pada konsep pembebasan (*liberation*) yang menjadi tujuan utama pedagogi Paulo Freire. Pembebasan dalam konteks pendidikan inklusif tidak dimaknai sebagai tindakan yang bersifat politis semata, melainkan sebagai proses pemberdayaan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan otonomi, kepercayaan diri, dan

kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Santos et al., (2021) menjelaskan bahwa pendidikan pembebasan dalam perspektif Freire menuntut adanya strategi pendidikan yang memungkinkan peserta didik melampaui keterbatasan yang selama ini dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap dirinya. Dalam konteks siswa ABK, pembebasan diwujudkan melalui penyediaan kesempatan belajar yang setara, pengakuan terhadap suara dan pengalaman mereka, serta penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung pengembangan potensi secara optimal. Sejalan dengan itu, Cappiali (2023) menegaskan bahwa pedagogi transformatif yang berakar pada pemikiran Freire mampu memperluas tujuan pendidikan tidak hanya pada pencapaian akademik, tetapi juga pada kesejahteraan, emansipasi individu, dan transformasi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan inklusif yang berlandaskan nilai pembebasan tidak hanya bertujuan mengintegrasikan siswa ABK ke dalam sistem sekolah, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai subjek yang memiliki hak, martabat, dan kemampuan untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat secara setara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa nilai-nilai dialog, humanisasi, kesadaran kritis, dan pembebasan bukan sekadar konsep normatif dalam pemikiran Paulo Freire, melainkan prinsip-prinsip pedagogis yang dapat diwujudkan secara konkret dalam praktik pendidikan inklusif. Melalui dialog yang setara, penghormatan terhadap martabat manusia, pengembangan kesadaran kritis, serta pemberdayaan peserta didik, sekolah inklusi memiliki potensi untuk menjadi ruang humanisasi yang mampu menghapus berbagai bentuk eksklusi terhadap siswa anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, implementasi pendidikan inklusif yang berlandaskan humanisme Freire tidak hanya berorientasi pada akses pendidikan, tetapi juga pada transformasi sosial yang menjamin pengakuan, partisipasi, dan pembebasan setiap peserta didik sebagai manusia yang utuh dan bermartabat.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Humanisme Pendidikan Paulo Freire dalam Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

Implementasi humanisme pendidikan Paulo Freire dalam penyelenggaraan sekolah inklusi tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Sebagai sebuah paradigma pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki martabat, kebebasan, dan potensi untuk berkembang, humanisme Freire menuntut adanya transformasi tidak hanya pada aspek pedagogis, tetapi juga pada budaya

sekolah, kompetensi pendidik, kebijakan kelembagaan, serta kesadaran sosial seluruh warga sekolah. Dalam perspektif Freire, pendidikan yang humanis hanya dapat terwujud apabila proses pembelajaran dibangun melalui relasi yang dialogis, partisipatif, dan emansipatoris, sehingga setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan akses pendidikan, melainkan juga oleh kemampuan sekolah dalam membangun lingkungan yang menghargai keberagaman dan menolak segala bentuk dehumanisasi terhadap siswa anak berkebutuhan khusus (ABK). Sebagaimana ditegaskan oleh Santos et al., (2021), pendidikan yang terinspirasi oleh pemikiran Freire harus berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik melalui hubungan yang lebih horizontal antara guru dan siswa serta didukung oleh strategi pendidikan yang membebaskan dan berkeadilan.

Salah satu faktor utama yang mendukung implementasi humanisme pendidikan Paulo Freire dalam sekolah inklusi adalah keberadaan guru yang memiliki kesadaran pedagogis kritis dan kompetensi inklusif. Dalam pemikiran Freire, guru bukan sekadar penyampai informasi, melainkan fasilitator yang membantu peserta didik membangun pengetahuan melalui dialog dan refleksi kritis. Guru yang memahami prinsip-prinsip humanisasi akan lebih mampu melihat siswa ABK sebagai individu yang memiliki potensi dan kapasitas untuk berkembang, bukan sebagai objek belas kasihan atau individu yang didefinisikan oleh keterbatasannya. Penelitian Sgambelluri & De Domenico (2023) menunjukkan bahwa pendidik inklusif harus memiliki kemampuan membangun relasi kemanusiaan yang autentik, mengembangkan dialog yang setara, serta menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan. Dalam konteks tersebut, keberhasilan sekolah inklusi sangat bergantung pada kemampuan guru untuk mengelola keberagaman peserta didik melalui pendekatan yang menghargai perbedaan dan menghindari praktik-praktik pedagogis yang bersifat diskriminatif.

Selain kompetensi guru, budaya sekolah yang inklusif dan demokratis juga menjadi faktor pendukung yang sangat menentukan. Freire memandang bahwa pendidikan merupakan praktik sosial yang berlangsung dalam suatu lingkungan budaya tertentu, sehingga proses humanisasi tidak mungkin

terwujud apabila budaya sekolah masih didominasi oleh relasi kuasa yang hierarkis dan eksklusif. Sekolah inklusi yang berlandaskan nilai-nilai Freire harus mampu membangun iklim pendidikan yang menghormati keberagaman, mendorong partisipasi seluruh peserta didik, serta memberikan ruang bagi berkembangnya solidaritas dan kerja sama. Galiza et al., (2022) menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan gerakan sosiopolitik yang bertujuan mengakui dan memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Oleh sebab itu, budaya sekolah yang mendukung pengakuan terhadap alteritas, penghormatan terhadap hak-hak peserta didik, dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi prasyarat penting bagi implementasi pendidikan humanis dalam lingkungan inklusif.

Faktor pendukung lainnya adalah keberadaan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks pendidikan inklusif, kebijakan yang mendukung penyediaan layanan pendidikan bagi siswa ABK menjadi instrumen penting untuk mewujudkan nilai-nilai humanisme Freire secara nyata. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan fasilitas aksesibel, pengembangan kurikulum yang adaptif, pelatihan guru, serta sistem evaluasi yang mempertimbangkan keragaman karakteristik peserta didik. Kocha & Senapathy (2022) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif yang efektif membutuhkan dukungan manajemen sekolah yang kuat, ketersediaan sumber daya pendidikan yang memadai, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, komitmen kelembagaan yang diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang dialogis, humanis, dan membebaskan sebagaimana dicita-citakan oleh Freire.

Meskipun demikian, implementasi humanisme pendidikan Paulo Freire dalam sekolah inklusi masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu hambatan utama adalah masih kuatnya stigma dan stereotip terhadap anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Freire menjelaskan bahwa dehumanisasi merupakan konsekuensi dari relasi sosial yang menempatkan kelompok tertentu sebagai pihak yang inferior dan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam konteks pendidikan inklusif, bentuk dehumanisasi tersebut tercermin dalam pandangan yang menganggap siswa ABK sebagai

individu yang tidak mampu belajar secara optimal atau tidak layak memperoleh kesempatan yang sama dengan peserta didik lainnya. Dube et al., (2021) menemukan bahwa berbagai mitos, prasangka, dan persepsi negatif terhadap penyandang disabilitas masih menjadi faktor utama yang menghambat akses dan partisipasi mereka dalam pendidikan. Stigma tersebut tidak hanya membatasi kesempatan belajar siswa ABK, tetapi juga menghambat upaya sekolah dalam membangun budaya pendidikan yang inklusif dan humanis.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran kritis sebagian pendidik serta pengelola sekolah mengenai hakikat pendidikan inklusif. Dalam perspektif Freire, pendidikan yang membebaskan hanya dapat diwujudkan apabila para pelaku pendidikan memiliki kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam lingkungan sosialnya. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak sekolah masih memahami inklusi sebatas integrasi fisik siswa ABK ke dalam kelas reguler tanpa diikuti perubahan paradigma pedagogis yang mendasar. Kocha & Senapathy (2022) mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai pendidikan inklusif, lemahnya kapasitas kepemimpinan sekolah, serta minimnya pelatihan bagi guru menjadi hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusif yang efektif. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan inklusif sering kali hanya bersifat administratif dan belum mampu menghadirkan pengalaman belajar yang benar-benar memberdayakan peserta didik.

Dari perspektif yang lebih luas, hambatan terhadap implementasi humanisme Freire juga berasal dari struktur pendidikan yang masih didominasi oleh pendekatan pedagogis tradisional dan berpusat pada guru. Cappiali (2023) menjelaskan bahwa model pendidikan yang berorientasi pada transmisi pengetahuan secara satu arah cenderung mereproduksi relasi kuasa yang tidak setara dan menghambat partisipasi aktif peserta didik. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan prinsip dialogis yang menjadi inti pemikiran Freire. Dalam praktik sekolah inklusi, dominasi model pembelajaran yang berpusat pada guru dapat menghambat keterlibatan siswa ABK dalam proses belajar serta membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan kemandirian dan kesadaran diri. Oleh karena itu, transformasi pedagogi menuju pendekatan yang lebih partisipatif, reflektif, dan transformatif menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung terwujudnya pendidikan inklusif yang humanis.

Selain faktor internal sekolah, tantangan lain muncul dari ketimpangan sosial yang masih melekat dalam sistem pendidikan. Corbett & Guilherme (2021) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kesadaran kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang memengaruhi kehidupan peserta didik. Dalam banyak kasus, siswa ABK berasal dari kelompok yang mengalami kerentanan sosial dan ekonomi sehingga menghadapi hambatan ganda dalam memperoleh pendidikan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi humanisme pendidikan Paulo Freire tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus disertai dengan upaya transformasi sosial yang lebih luas untuk menghapus berbagai bentuk eksklusi dan marginalisasi yang dialami peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan penerapan humanisme pendidikan Paulo Freire dalam penyelenggaraan sekolah inklusi dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Kompetensi guru, budaya sekolah yang inklusif, dukungan kebijakan, dan komitmen kelembagaan merupakan faktor-faktor yang memperkuat implementasi pendidikan yang dialogis, humanis, dan membebaskan. Sebaliknya, stigma terhadap disabilitas, rendahnya kesadaran kritis, keterbatasan sumber daya pendidikan, serta dominasi paradigma pedagogis tradisional menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistematis. Dengan demikian, penerapan humanisme pendidikan Paulo Freire dalam sekolah inklusi menuntut transformasi menyeluruh pada aspek pedagogis, kultural, dan struktural agar sekolah benar-benar mampu menjadi ruang humanisasi yang menjamin partisipasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat setiap peserta didik tanpa terkecuali.

Pendekatan Humanistik Paulo Freire dalam Mendorong Partisipasi, Pemberdayaan, dan Pengembangan Potensi Siswa Anak Berkebutuhan Khusus

Pendekatan humanistik Paulo Freire memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong partisipasi, pemberdayaan, serta pengembangan potensi siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam lingkungan pendidikan inklusif. Hal ini berangkat dari asumsi dasar Freire bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, merupakan subjek historis yang memiliki kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mentransformasikan realitas kehidupannya. Dalam perspektif Freire, pendidikan tidak boleh menempatkan peserta didik sebagai objek pasif yang hanya menerima pengetahuan dari guru, melainkan sebagai

individu yang memiliki kapasitas untuk membangun pengetahuan melalui proses dialog, refleksi, dan tindakan. Pandangan ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan paradigma pendidikan inklusif yang menolak segala bentuk diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dan menegaskan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam seluruh aktivitas pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan humanistik Freire memberikan dasar filosofis yang kokoh bagi penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya menjamin akses belajar bagi siswa ABK, tetapi juga memungkinkan mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sebagai subjek yang memiliki suara, pengalaman, dan potensi yang bernilai. Sebagaimana dikemukakan oleh Santos et al. (2021), kontribusi utama pemikiran Freire terhadap pendidikan khusus terletak pada kemampuannya membangun pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik melalui hubungan yang lebih horizontal antara guru dan siswa serta melalui praktik pendidikan yang membebaskan dari berbagai bentuk keterbatasan sosial yang dilekatkan kepada penyandang disabilitas.

Partisipasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pendidikan inklusif. Dalam perspektif Freire, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai kehadiran fisik peserta didik dalam ruang kelas, melainkan keterlibatan aktif mereka dalam proses membangun pengetahuan dan mengambil bagian dalam kehidupan sosial sekolah. Pendidikan yang dialogis memungkinkan peserta didik mengemukakan pandangan, pengalaman, dan kebutuhannya secara bebas tanpa rasa takut terhadap penolakan maupun diskriminasi. Dalam konteks siswa ABK, pendekatan ini menjadi sangat penting karena selama ini mereka sering kali diposisikan sebagai penerima layanan pendidikan yang pasif. Freire menolak paradigma tersebut dan menekankan bahwa setiap peserta didik harus diberikan kesempatan untuk menjadi pelaku utama dalam proses pembelajaran. Galiza et al., (2022) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif dalam perspektif Freire merupakan gerakan sosial yang berupaya mengakui dan menghargai keberadaan kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi. Melalui pengakuan tersebut, peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan dan mengembangkan identitas dirinya sebagai individu yang memiliki hak serta kapasitas yang setara dengan peserta didik lainnya. Dengan demikian, pendekatan humanistik Freire mampu menggeser paradigma

pendidikan dari pola paternalistik menuju pola partisipatif yang menempatkan siswa ABK sebagai aktor utama dalam pengalaman belajarnya sendiri.

Lebih lanjut, pendekatan humanistik Paulo Freire memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemberdayaan siswa anak berkebutuhan khusus. Dalam pemikiran Freire, pemberdayaan tidak dimaknai sebagai pemberian kekuasaan dari pihak yang dominan kepada pihak yang lemah, melainkan sebagai proses pengembangan kesadaran kritis yang memungkinkan individu mengenali potensi dirinya dan bertindak untuk mengubah kondisi yang membatasi kehidupannya. Pendidikan yang membebaskan harus mampu membantu peserta didik memahami bahwa mereka memiliki kemampuan untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan inklusif, pemberdayaan siswa ABK menjadi sangat penting mengingat mereka sering menghadapi stigma sosial yang mengonstruksi disabilitas sebagai bentuk ketidakmampuan. Sgambelluri & De Domenico (2023) menegaskan bahwa pendidik inklusif harus membangun proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan proyek kehidupan (*life project*) peserta didik melalui relasi yang dialogis dan pemberian kesempatan untuk mengambil keputusan terkait proses belajarnya. Melalui pendekatan tersebut, siswa ABK tidak lagi diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah perkembangan dirinya sendiri. Pemberdayaan yang lahir dari kesadaran kritis inilah yang menjadi inti dari pendidikan humanistik Freire dan sekaligus menjadi fondasi bagi penguatan kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus.

Selain mendorong partisipasi dan pemberdayaan, pendekatan humanistik Freire juga berkontribusi terhadap pengembangan potensi siswa ABK secara optimal. Freire menolak pendekatan pendidikan yang hanya berfokus pada kekurangan atau keterbatasan peserta didik karena pendekatan tersebut berpotensi melahirkan praktik dehumanisasi. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya pendidikan yang berangkat dari kekuatan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Perspektif ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang memandang keberagaman sebagai sumber kekayaan pembelajaran, bukan sebagai hambatan. Penelitian Santos et al., (2021) menunjukkan bahwa pendekatan Freire memungkinkan guru untuk memfokuskan proses pendidikan pada pengembangan area potensial peserta didik secara etis dan reflektif, sehingga peserta didik didorong untuk melampaui

berbagai keterbatasan yang selama ini dianggap melekat pada dirinya. Dengan demikian, siswa ABK tidak lagi dilihat berdasarkan kategori disabilitas yang dimilikinya, melainkan berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan melalui proses pendidikan yang tepat. Pendekatan ini sangat penting karena memungkinkan sekolah inklusi menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, dan kemandirian peserta didik secara simultan.

Pengembangan potensi tersebut semakin optimal ketika pendekatan humanistik Freire dipadukan dengan pedagogi transformatif yang berorientasi pada kesejahteraan dan emansipasi peserta didik. Cappiali (2023) menjelaskan bahwa pedagogi transformatif yang berakar pada pemikiran Freire memperluas tujuan pendidikan tidak hanya pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan kesejahteraan individu, kapasitas reflektif, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial. Dalam konteks siswa ABK, pendekatan ini memungkinkan peserta didik mengembangkan rasa percaya diri, keberanian untuk mengekspresikan diri, serta kemampuan untuk menjalin relasi sosial yang lebih luas. Pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses adaptasi peserta didik terhadap sistem yang ada, melainkan sebagai ruang untuk mengembangkan seluruh dimensi kemanusiaannya. Oleh karena itu, pendekatan humanistik Freire memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membangun lingkungan pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi kebutuhan individual peserta didik sekaligus mendorong perkembangan kapasitas personal dan sosial mereka secara berkelanjutan.

Dimensi lain yang menunjukkan efektivitas pendekatan humanistik Freire adalah kemampuannya dalam membangun kesadaran kritis dan *agency* peserta didik. Freire meyakini bahwa pendidikan harus membantu peserta didik memahami posisi dirinya dalam struktur sosial sehingga mereka mampu bertindak secara sadar untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Corbett & Guilherme (2021) menjelaskan bahwa pedagogi kritis Freire menempatkan peserta didik sebagai agen perubahan yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam transformasi sosial melalui proses refleksi dan tindakan. Dalam konteks pendidikan inklusif, pengembangan *agency* menjadi sangat penting karena memungkinkan siswa ABK melihat dirinya sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, mengambil keputusan, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Melalui proses tersebut,

siswa tidak hanya memperoleh keterampilan akademik, tetapi juga mengembangkan kepercayaan diri dan identitas positif yang menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang mungkin mereka alami di luar lingkungan sekolah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Gandolfi (2023) yang menyatakan bahwa warisan pedagogi Freire terletak pada kemampuannya menghubungkan dialog, kesadaran kritis, emansipasi, dan transformasi sosial dalam satu kerangka pendidikan yang utuh. Melalui komunikasi dialogis dan penghargaan terhadap pengalaman peserta didik, pendidikan mampu menjadi sarana yang efektif untuk membangun partisipasi sosial dan memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi. Dalam konteks siswa ABK, pendekatan tersebut memungkinkan mereka memperoleh pengakuan sosial yang lebih luas serta kesempatan untuk berkontribusi dalam komunitas belajar secara bermakna. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang memperkuat kapasitas individu dalam mengembangkan potensinya secara optimal.

Berdasarkan keseluruhan temuan kajian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan humanistik Paulo Freire memiliki kapasitas yang sangat besar dalam mendorong partisipasi, pemberdayaan, dan pengembangan potensi siswa anak berkebutuhan khusus. Melalui prinsip dialog, humanisasi, kesadaran kritis, dan pembebasan, peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemandirian, serta mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya secara optimal. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam mengubah paradigma pendidikan dari yang semula berorientasi pada keterbatasan menuju paradigma yang berfokus pada kekuatan dan potensi peserta didik. Oleh karena itu, humanisme pendidikan Paulo Freire tidak hanya relevan sebagai landasan filosofis pendidikan inklusif, tetapi juga terbukti memiliki nilai strategis dalam mewujudkan sekolah yang mampu memberdayakan setiap peserta didik sebagai manusia yang merdeka, bermartabat, dan berdaya guna dalam kehidupan sosialnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa humanisme pendidikan Paulo Freire memiliki relevansi yang sangat kuat dan

signifikan dalam implementasi sekolah inklusi bagi siswa anak berkebutuhan khusus (ABK). Prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan Freire, seperti humanisasi, dialog, kesadaran kritis (*conscientization*), dan pembebasan (*liberation*), memiliki kesesuaian substantif dengan nilai-nilai fundamental pendidikan inklusif yang menempatkan setiap peserta didik sebagai individu yang memiliki martabat, hak, dan potensi yang setara untuk berkembang. Kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya penyediaan akses pendidikan bagi siswa ABK, melainkan sebagai proses transformasi pendidikan yang bertujuan menghapus berbagai bentuk marginalisasi, diskriminasi, dan dehumanisasi yang masih berlangsung dalam praktik pendidikan. Dalam konteks tersebut, pemikiran Paulo Freire menawarkan landasan filosofis yang mampu memperkuat orientasi pendidikan inklusif menuju terciptanya lingkungan belajar yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa perwujudan nilai-nilai dialog, humanisasi, kesadaran kritis, dan pembebasan dalam praktik pendidikan inklusif merupakan elemen penting dalam menciptakan sekolah yang benar-benar inklusif. Dialog memungkinkan terbangunnya relasi yang setara antara guru dan peserta didik sehingga siswa ABK memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasinya secara bebas. Humanisasi mendorong sekolah untuk memandang peserta didik berdasarkan potensi dan kemanusiaannya, bukan berdasarkan keterbatasan yang dimilikinya. Kesadaran kritis berfungsi membangun pemahaman kolektif terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami kelompok rentan, sedangkan pembebasan menjadi tujuan akhir yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemandirian, kepercayaan diri, dan kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, implementasi pendidikan inklusif yang berlandaskan nilai-nilai Freire tidak hanya berorientasi pada integrasi siswa ABK ke dalam sistem pendidikan, tetapi juga pada pemberdayaan mereka sebagai subjek pendidikan yang utuh dan bermartabat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan penerapan humanisme pendidikan Paulo Freire dalam sekolah inklusi dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendukung meliputi kompetensi guru yang memiliki kesadaran pedagogis

kritis, budaya sekolah yang inklusif dan demokratis, kebijakan pendidikan yang berpihak pada prinsip kesetaraan, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Sebaliknya, berbagai hambatan masih ditemukan dalam bentuk stigma terhadap disabilitas, rendahnya pemahaman tentang pendidikan inklusif, keterbatasan sumber daya pendidikan, serta dominasi paradigma pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru. Keberadaan hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif yang humanis memerlukan transformasi yang tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga kultural, struktural, dan sosial. Oleh karena itu, upaya mewujudkan sekolah inklusi yang berlandaskan humanisme Freire harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kapasitas pendidik, pembangunan budaya sekolah yang menghargai keberagaman, serta pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

Lebih jauh, kajian ini menegaskan bahwa pendekatan humanistik Paulo Freire memiliki kapasitas yang sangat besar dalam mendorong partisipasi, pemberdayaan, dan pengembangan potensi siswa ABK secara optimal. Melalui pendidikan yang dialogis dan membebaskan, siswa ABK tidak lagi diposisikan sebagai objek layanan pendidikan, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam membangun pengetahuan, menentukan pilihan, serta mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya pergeseran paradigma dari model pendidikan yang berorientasi pada defisit menuju model pendidikan yang berorientasi pada kekuatan dan potensi peserta didik. Dengan demikian, humanisme pendidikan Paulo Freire tidak hanya relevan sebagai kerangka teoritis dalam memahami pendidikan inklusif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang strategis dalam mewujudkan sekolah yang mampu menjamin partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan penghormatan terhadap martabat seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Pada akhirnya, implementasi sekolah inklusi yang berlandaskan humanisme Freire dapat dipandang sebagai salah satu bentuk praksis pendidikan transformatif yang berkontribusi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil, demokratis, humanis, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Cappiali, T. M. (2023). A Paradigm Shift for a More Inclusive, Equal, and Just Academia? Towards a Transformative-Emancipatory Pedagogy. *Education Sciences*, 13(9), 876–882. <https://doi.org/10.3390/educsci13090876>
- Corbett, J., & Guilherme, A. (2021). Critical pedagogy and quality education

- (UNESCO SDG-4): The legacy of Paulo Freire. *Ethics and Education*, 16(4), 447–463. <https://doi.org/10.1080/17449642.2021.1962900>
- Dube, B., Mpu, Y., & Chitumba, W. (2021). Interventions to reduce the exclusion of children with disabilities from education: A systematic review. *Cogent Education*, 8(1), 1913848. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2021.1913848>
- Esquinsani, R. S. S. (2021). Paulo Freire e a escola necessária à inclusão. *Revista Teias*, 22(67), 1–15. <https://doi.org/10.12957/teias.2021.62071>
- Florian, L., & Beaton, M. (2022). Inclusive pedagogy in action: Getting it right for every child. *International Journal of Inclusive Education*, 26(8), 785–798. <https://doi.org/10.1080/13603116.2022.2058450>
- Freire, P. (1998). *Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic courage*. Rowman & Littlefield.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of hope: Reliving pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Freire, P. (2007). *Pedagogy of autonomy: Knowledge necessary for educational practice*. Rowman & Littlefield.
- Freire, P. (2018). *Education for critical consciousness*. Bloomsbury Academic.
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed (50th Anniv)*. Bloomsbury Academic.
- Galiza, D. D. F., Mercês, M. C. D., & Bentes, A. N. (2022). Inclusive education in the Freirean perspective. *Research, Society and Development*, 11(9), e52111931971. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i9.31971>
- Gandolfi, H. E. (2023). Transnational conversations about science education: Paulo Freire, interculturality and socio-political transformation. *Cultural Studies of Science Education*, 18(3), 765–781. <https://doi.org/10.1007/s11422-023-10163-6>
- Kocha, D. F., & Senapathy, M. (2022). Practice and challenges of the implementation of inclusive education strategy in secondary schools. *Shanlax International Journal of Education*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.34293/education.v11i1.5177>
- Moriña, A. (2024). Inclusive education in higher education: Challenges and opportunities. *International Journal of Inclusive Education*, 1(2), 3–17. <https://doi.org/10.1080/13603116.2024.2308596>
- Santos, M. A. D., Oliveira, A. A. S., & Caiado, K. R. M. (2021). Theoretical reflection on the contributions of Paulo Freire's work to special education. *Revista Ibero-Americana de Estudos Em Educação*, 16(4), 2950–2967. <https://doi.org/10.21723/riaee.v16i4.14493>
- Sgambelluri, R., & De Domenico, L. (2023). The inclusive educator: A return to Paulo Freire's pedagogy. *Italian Journal of Special Education for Inclusion*, 11(1), 79–92. <https://doi.org/10.7346/sipes-01-2023-06>
- Slee, R. (2022). Inclusive education isn't dead, it just smells funny. *International Journal of Inclusive Education*, 26(14), 1421–1433. <https://doi.org/10.1080/13603116.2022.2125663>
- Walton, E., & Osman, R. (2023). Teacher education for inclusive education. *Journal of Education for Teaching*, 49(4), 577–590. <https://doi.org/10.1080/02607476.2023.2175397>